



Pangeran Asir Sang Penguasa Kawedanan Rupit Rawas (Tinjauan Historis Kepemimpinan Politik Pangeran Asir Tahun 1922-1942)

Yadri Irwansyah, Agus Susilo

yadriirwansyah@gmail.com, agussusilo4590@gmail.com

STKIP PGRI Lubuklinggau

Abstract

The study of this study discusses the historical aspects of the political leadership of Prince Asir, ruler of Kawedanan Rupit Rawas (1922-1942). Rupit Rawas Kawedanan was a Dutch territory after the fall of the Palembang Sultanate. Kawedanan Rupit Rawas was led by Prince Asir as local leader of Rupit Rawas over the mandate given by the Dutch colonial government. This study uses the History method to explore the Local History of the Palembang Sultanate in the past. The stages of research begin with heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The research findings show that Rupit Rawas Kawedanan at that time had a fertile area that produced natural resources, such as rubber, fruits and others. This area is drained by Rawas river which then encourages the emergence of trade activities. Prince Asir is a charismatic leader who leads Rupit Rawas. He is a Dutch colonial leader who is considered capable, intelligent and accomplished and is considered capable of maintaining a commitment to the Netherlands. He was known as a wise leader and left many historical traces at Rupit Rawas Kawedanan. During the struggle for Indonesian independence, Prince Asir was very instrumental in facilitating the Indonesian nation's struggle in Sumatra against the Dutch.

Keywords: Prince Asir, Kawedanan, Rupit Rawas, Leadership

Abstrak

Kajian penelitian ini membahas tentang aspek historis kepemimpinan politik Pangeran Asir, penguasa Kawedanan Rupit Rawas (1922-1942). Kawedanan Rupit Rawas merupakan wilayah kekuasaan Belanda setelah jatuhnya Kesultanan Palembang. Kawedanan Rupit Rawas dipimpin oleh Pangeran Asir sebagai pemimpin lokal Rupit Rawas atas mandat yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penelitian ini menggunakan metode Sejarah untuk menggali Sejarah Lokal Kesultanan Palembang masa lampau. Tahapan penelitian diawali dengan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kawedanan Rupit Rawas saat itu memiliki wilayah yang subur sehingga menghasilkan sumber alam, seperti karet, buah-buahan dan lain-lainnya. Daerah ini dialiri sungai Rawas yang kemudian mendorong munculnya aktivitas perdagangan. Pangeran Asir adalah sosok pemimpin kharismatik yang memimpin Kawedanan Rupit Rawas. Pangeran Asir adalah seorang pemimpin pilihan kolonial Belanda yang dianggap cakap, cerdas dan ulung serta dinilai mampu menjaga komitmen untuk Belanda. Pangeran Asir dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan banyak meninggalkan jejak sejarah di Kawedanan Rupit Rawas. Pada masa perjuangan kemerdekaan

Yadri Irwansyah, Agus Susilo
Pangeran Asir Sang Penguasa Kawedanan Rupit Rawas (Tinjauan Historis Kepemimpinan
Politik Pangeraan Asir Tahun 1922-1942)

Indonesia, Pangeran Asir sangat berjasa dengan memfasilitasi perjuangan bangsa Indonesia di Sumatera melawan Belanda.

Kata kunci: *Pangeran Asir, Kawedanan, Rupit Rawas, dan Kepemimpinan*

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Birokasi pemerintah seringkali diartikan sebagai *officialdom* atau pejabatkerajaan. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yang yurisdiktif. Di dalam yurisdiktif tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (*official duties*). Salah satu perubahan *mindset* yang perlu dilakukan ialah pandangan birokrasi terhadap kekuasaan (*power*) yang cenderung menjadikan birokrasi sebagai kekuatan sakral. Kekuasaan pada birokrasi yang diwujudkan dalam jabatan pejabat bisa sangat menakutkan dan sangat jarang dapat ditembus oleh lapisan masyarakat yang sangat lemah dihadapan kekuasaan birokrasi tersebut. Kekuasaan seperti ini membuat birokrasi menjadi sangat sakral (Thoha, 2010).

Kawedanan berasal dari bahasa Jawa yang berarti wilayah administrasi pemerintahan. Posisi kawedanan berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan (di antara kabupaten dan kecamatan) yang berlaku pada masa Hindia-Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan. Bentuk sistem birokrasi ini adalah produk kolonial yang bertujuan mempermudah pemerintah kolonial untuk mengatur daerah-daerah kekuasaannya. Setingkat diatas kawedanan adalah *Afdeeling* (karesidenan) yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Kawedanan Rupit Rawas berada dibawah Afdeeling Rawas dan berpusat Surulangun” (Suwandi, 2010). Kawedenanan Rupit Rawas dipimpin oleh seorang wedana atau pangeran yang ditunjuk oleh Belanda untuk membantu Belanda mengatur daerah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya seorang wedana atau pangeran diawasi oleh *controluer* yang merupakan orang Belanda. *Controluer* bertugas mengkoordinir para wedana atau pangeran untuk memungut pajak dan hasil bumi dari rakyat.

Baidjuri Asir, mengatakan sebagai berikut:

“Kawedanan Rupit Rawas dipimpin oleh Pangeran H. Muhammad Asir yang membawahi kurang lebih sepuluh desa terdiri dari Muara Rupit, Lawang Agung, Karang

Panggung Ilir, Bingin Rupit, Maur, Noman, Batu Gajah, Pantai Ulu, Tanjung Beringin dan Lubuk Rumbai. Pangeran H. Muhammad Asir juga merangkap sebagai *pesirah* (kepala marga) di Palembang sejak tahun 1923. *Pesirah* adalah orang yang dipilih dan dipercaya rakyat untuk memimpin sekaligus menegakkan hukum-hukum adat di wilayahnya”.(B. Asir, 2018)

Di dalam kepemimpinannya sebagai seorang pangeran dan sekaligus *pesirah* banyak hal yang telah dilakukan seorang Muhammad Asir. Dua legitimasi sekaligus ia dapatkan untuk memimpin Kawedanan Rupit Rawas. Legitimasi pertama sebagai pangeran dari pemerintah kolonial Belanda dan legitimasi kedua dari rakyat sebagai seorang *pesirah*. Dua hal yang kontradiktif namun menarik. Hal ini menunjukkan bahwa figur seorang Muhammad Asir memang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

Kemampuan untuk menyatukan aspek-aspek manusia menjadi kesulitan tersendiri dalam suatu birokrasi public. Pimpinan harus dapat membuat bawahan agar memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja demi mencapai tujuan organisasi birokrasi publik. Dalam birokrasi yang baik perlu penerapan model motivasi yang mampu semaksimal mungkin memberikan inspirasi kepada pegawai. Dalam hal ini internalisasi nilai-nilai disiplin, ketekunan, ketelitian dan semangat berdedikasi perlu mendapatkan perhatian khusus. Pimpinan birokrasi seharusnya mampu memberikan inspirasi melalui keteladanan yang baik, misalnya perilaku serius dalam bekerja, semangat berjuang yang tinggi, perilaku efektif, perilaku yang konsisten, dan etos kerja yang tinggi. Hal yang demikian inilah yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap motivasi para pegawai (Pasolong, 2008).

Pangeran Asir dalam memimpin rakyatnya di kawedanan Rupit Rawas digambarkan sebagai sosok yang tegas dan adil. Informasi ini diperoleh informan penelitian, seorang *pesirah* yang diwawancarai tahun 2016. *Pesirah* mengatakan “pangeran Asir adalah sosok yang tegas dan adil. Masalah-masalah sosial masyarakat, seperti perjudian, mabuk-mabukan dan perzinahan diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan aturan adat”. Informasi lain yang diperoleh dari Yunus pada saat wawancara tahun 2016 juga menegaskan “dalam soal pangan jika ada rakyat yang kekuarangan beras atau bahan makanan lainnya Pangeran Asir turun sendiri untuk menyelesaikannya”.

Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang demokratis menjalankan roda pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Transparansi pemerintahan dapat dilihat dari adanya

sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial, mengurangi campur tangan kontrol oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi (Thoha, 2010).

Dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan, Pangeran Asir memang tidak terlibat secara langsung (fisik). Peran Pangeran Asir terlihat dari upayanya melakukan akomodasi terhadap para pejuang kemerdekaan, menyediakan tempat tinggal, bahan makanan, bahkan kediamannya dijadikan sebagai tempat untuk merancang strategi dan taktik perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Para pejuang tersebut di antaranya Jenderal Hasan Kasim, Harun Sohar dan Alamsyah mereka semua adalah pejuang kemerdekaan yang bergerilya di wilayah *Afdeeling* Rawas. Dua hal yang sangat berlawanan satu sisi Pangeran Asir dipercaya oleh Belanda untuk memimpin kawedanan Rupit Rawas, sisi lain rasa nasionalisme Pangeran Asir juga besar terhadap bangsa dan negaranya.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam pada keturunan dari Pangeran Asir dan tokoh-tokoh masyarakat Rupit Rawas. Menurut Gottschalk (2008), “metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau”. Sebagaimana lazimnya tahapan penelitian sejarah diawali dengan heuristik, yakni teknik atau cara-cara untuk menemukan sumber yang bisa didapat baik melalui studi kepustakaan, pengamatan secara langsung di lapangan atau melalui wawancara (Alian, 2012). Sumber sejarah menurut Gottschalk (2008), yaitu peninggalan kehidupan manusia dan hasil aktivitas yang dikomunikasikan.

Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah untuk memperoleh informasi yang akurat dan berhubungan dengan permasalahan di atas (kepemimpinan Pangeran Asir). Adapun sumber yang penulis dapatkan diantaranya dari Perpustakaan Nasional di Jakarta, Balai Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Perpustakaan STKIP PGRI Lubuklinggau, Perpustakaan Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Lubuklinggau, Perpustakaan Daerah Kota Lubuklinggau dan beberapa toko buku di Kota Lubuklinggau, Palembang dan Jakarta.

Selain menggunakan studi pustaka, penulis juga melakukan wawancara dan dokumentasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Depdiknas (2008), wawancara adalah tanya-jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal atau peristiwa. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (Sukardi, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Keluarga Pangeran Asir, Tokoh Masyarakat Rupit Rawas, petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lubuklinggau Musi Rawas Utara, Masyarakat Umum di Kawasan Rupit Rawas, Balai Arsip Daerah, Lurah, Camat, dan Bupati Musi Rawas Utara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan disamping catatan tertulis maupun melalui ingatan dengan mempergunakan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Dalam menggunakan sumber-sumber sejarah, harus dilakukan evaluasi berupa kritik terhadap sumber-sumber sejarah yang ditemukan. Kritik sumber adalah proses menguji sumber, apakah sumber yang dikemukakan asli atau palsu (kritik ekstern) dan apakah dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan atau tidak (Alian, 2012). Kritik sumber ada dua macam, yaitu: kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah menyelidiki untuk menentukan keaslian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W (*who, what, when, where, dan why*+ 1H (*how*)). Sedangkan kritik intern adalah penentuan dapat tidaknya keterangan yang diperoleh dalam dokumen digunakan sebagai fakta sejarah (Marzuki Yass, 2004).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Depdiknas, 2008), kritik intern adalah tahap kerja yang dilakukan berdasarkan hasil liputan data lapangan yang membangun baik sumber tertulis maupun analogi epigraf. Kritik intern adalah suatu usaha analisis untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut akurasi, nilai dokumen, dan autensitas peninggalan yang telah diperoleh dari lapangan (Sukardi, 2003). Kritik ekstern adalah tahap penelitian berdasarkan liputan fisik berupa deskripsi bentuk, jenis aksara, bahan, lingkungan, dan lingkungan, serta lokasi keberadaan prasasti (sumber sejarah). Bila sumber tersebut merupakan sumber tertulis seperti buku, maka peneliti harus melihat hal-hal yang berkaitan dengan penampilan luar yang meliputi kertas, tintanya tulisan kalimat, gaya bahasa/ejaan yang digunakan pengarang.

Tahapan selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah interpretasi atau penafsiran. Peneliti membuat tafsiran/interpretasi subjektif dengan mencantumkan sumber yang digunakan. Interpretasi maksudnya adalah

menganalisis data-data sejarah. Melalui interpretasi penulis berusaha menghubungkan fakta atau berusaha memberikan penafsiran apa yang ada dalam penulisan laporan penelitian (Kuntowijoyo, 1995). Peneliti mencoba menguraikan sistem kepemimpinan penguasa-penguasa zaman penjajahan Belanda sehingga dapat disimpulkan dan dibandingkan sistem kepemimpinan tokoh-tokoh setelah Indonesia merdeka. Kemudian tahap sintesis, yaitu kebalikan dari analisis, dari uraian-uraian informasi peneliti mencoba menyatukan dan mengambil kesimpulan tentang "*Pangeran Asir Sang Penguasa Kawedanan Rupit Rawas*" (*Tinjauan Historis Kepemimpinan Politik Pangeran Asir tahun 1922 -1942*)".

Tahapan terakhir dalam metode sejarah adalah penulisan atau dikenal dengan historiografi. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses (Gottschalk, 1986). Penulisan laporan disusun berdasarkan *serialisasi* (kronologis, kausasi, dan imajinasi). Penulisan sejarah sedapat mungkin disusun berdasarkan kronologis (Kuntowijoyo, 1995).

Dalam penulisan sejarah biasanya melibatkan penelitian suatu gejala sejarah dengan jangka yang relatif panjang (aspek diakronis), dan melibatkan penelitian pada aspek ekonomi, masyarakat, atau politik (aspek sinkronis) biasanya memakai pendekatan ilmu-ilmu sosial (Kuntowijoyo, 1995). Berdasarkan pernyataan di atas, maka pendekatan sosial yang digunakan adalah pendekatan sosiologi, geografi, antropologi, ekonomi dan politik. *Pendekatan sosiologi* yaitu melihat segi-segi sosial suatu peristiwa yang dikaji, seperti golongan sosial mana yang berperan serta nilai-nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi dan lain-lain sebagainya (Nottingham, 1996). *Pendekatan geografi* yaitu digunakan untuk melihat letak suatu wilayah dan keadaan alam dimana suatu peristiwa terjadi. Pendekatan ini menyoroti daerah atau wilayah kekuasaan Pangeran Asir selama memimpin Kawedanan Rupit Rawas tahun 1922-1942. *Pendekatan antropologi* yaitu menggambarkan sekelompok manusia yang meliputi seluruh aspek kebudayaannya yang saling berhubungan. *Pendekatan ekonomi*, yaitu pendekatan dengan mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. *Pendekatan politik*, yaitu pola distribusi kekuasaan yang menjadi tulang punggung sejarah (Romdon, 1996).

Hasil Dan Pembahasan

Dalam tulisan Suwandi (2010), tentang sejarah Desa Muara Rupit Rawas ada dua versi yang menjelaskan tentang sejarah asal usul orang pertama yang mendiami Desa Muara Rupit Rawas. Yang pertama, Desa Muara Rupit Rawas berasal dari pulau Jawa yang dibawa dua orang dari

Jawa Timur (Surabaya) yang bernama Demolelo dan Demosito. Mereka mengikuti keluarganya kemudian tinggal dan menetap di Muara Rupit. Yang kedua, asal Muara Rupit sendiri berawal dari kemenangan adu panco yang dilakukan oleh Depati Kecik dengan orang Portugis di Palembang kemudian kemenangan itu dibawa ke Muara Rupit Rawas dengan membawa satu buah pencalang (perahu besar) yang berisi orang-orang dan barang-barang. Nama Rupit Rawas berasal dari pertemuan sungai Rupit dan sungai Rawas di sebuah muara, jadi nama desa ini adalah Muara Rupit Rawas. Rupit Rawas terbentuk tahun 1816 pada waktu itu dipimpin oleh Adipati Kecik yang dengan membawa kemenangan adu panco ke muara rupit dan menetap disana.

Rupit Rawas awalnya adalah bagian dari wilayah Kesultanan Palembang, namun ketika Kesultanan Palembang jatuh ketangan Belanda tahun 1821 (Perang Menteng), Kolonial Belanda mengganti nama Kesultanan Palembang menjadi Karesidenan Palembang. Kolonial Belanda kemudian mulai melakukan ekspansi kedaerah Uluan Palembang dan berhasil menguasainya serta menjalankan pemerintahan. Kolonial Belanda membagi wilayah Karesidenan Palembang menjadi beberapa wilayah binaan (*Afdeling*) yakni :

1. *Afdeling* Banyu Asin Kubustreken ibukotanya Palembang
2. *Afdeling* Muara Enim Kubustreken ibukotanya Baturaja
3. *Afdeling* Palembangche Boven Landen ibukotnya Lahat dengan beberapa *Onder Afdeling (Oafd)* yakni:
 - *Onder Afdeling* Lematang Ulu ibukotanya Lahat
 - *Onder Afdeling* Tanah Pasemah ibukotanya Pagar Alam
 - *Onder Afdeling* Lematang Ilir ibukotanya Muara Enim
 - *Onder Afdeling* Musi Ulu ibukotanya Muara Beliti
 - *Onder Afdeling* Rawas ibukotanya Surulangun Rawas-- Selayang Pandang Kaupaten Musi Rawas (Suwandi, 2010).

Pada mulanya sistem pemerintahahn di wilayah Hindia Belanda dijalankan berdasarkan sistem sentralisasi. Dalam konteks masyarakat tradisional, terdapat kaitan erat antara penduduk dengan kemakmuran. Para penguasa lokal di Nusantara menjadikan penduduk sebagai sumber kepentingan dalam mewujudkan kemakmuran. Tanpa adanya penduduk, kekayaan alam yang melimpah tidak akan berarti. Para penguasa memerlukan penduduk bukan hanya dalam kaitannya dengan suplai tenaga untuk angkatan perang demi kepentingan pertahanan dan kestabilan kekuasaan, melainkan juga sebagai sumber penting angkatan kerja yang diperlukan dalam rangka mengeksploitasi beragam kekayaan alam yang dimiliki demi kepentingan penguasa (Nawiyanto & Endrayadi, Eko, 2016).

Dalam kehidupan sosial masyarakat Rupit Rawas diatur dalam aturan-aturan yang diambil dari *Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya* yang mengatur pola laku, pola tindak dan pola sikap masyarakat Rupit Rawas seperti adat istiadat soal perkawinan, adat penghukuman, adat tentang marga, aturan kaum dan aturan tentang dusun serta berladang. *Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya* ditulis oleh Ratu Sinuhun, istri dari penguasa Palembang Pangeran Sido Ing Kenayang (1636-1642). Informasi yang diperoleh dari Bapak Kamaludin AZ, tokoh masyarakat Muara Rupit (wawancara 20 April 2018) menyatakan:

Adat istiadat dalam perkawinan misalnya rasan baik atau rasan tuo sewaktu akan meminang orangtua laki-laki datang kepada orangtua perempuan dengan membawa sebuah tepak yang berisi kapur sirih dan rokok. Orangtua perempuan kemudian memakan sirih dan merokok barulah pembicaraan tentang pernikahan atau rasan bisa dilaksanakan. Orangtua laki-laki menjelaskan maksud kedatangannya, kemudian setelah rasan itu diterima maka pihak laki-laki harus memenuhi syarat-syarat lain seperti uang tunai paling sedikit Rp. 40.000 dan paling banyak Rp. 100.000, beras sebanyak 400 kg, daging kerbau sebanyak 40 kg, satu kempel gandum, 50 kg gula pasir, satu kaleng minyak kelapa dan satu kaleng minyak tanah. Setelah permintaan itu dapat dipenuhi barulah menentukan hari pelaksanaan pernikahan (Az, 2018).

Dalam sejarahnya Kawedanan Rupit Rawas pernah dipimpin oleh dua orang pangeran dan empat orang adipati dari kurun waktu 1884 - 1954, salah satunya adalah Pangeran Asir yang memimpin selama dua periode yakni tahun 1922- 1952 (periode pertama) dan tahun 1953- 1954 (periode kedua). Hal yang menarik dari kepemimpinan seorang Pangeran Asir adalah beliau mendapatkan dua kepercayaan sekaligus, yaitu kepercayaan dari kolonial Belanda sebagai seorang pangeran yang memimpin Kawedanan Rupit Rawas dan kepercayaan dari rakyat menjadi *Pasirah* untuk menjadi pemimpin Marga Muara Rupit Rawas.

Pangeran H. Muhammad Asir lahir di Desa Lawang Agung (Muratara) pada tahun 1902, anak dari pasangan H. Ahmad dan Hj. Mahiba merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Pangeran Asir mempunyai seorang kakak laki-laki yaitu Muhammad Ali dan dua orang adik laki-laki Muhammad Hasan dan Muhammad Latif. Mengenai asal asul Pangeran Asir seperti yang disampaikan oleh Baidjuri Asir tanggal 1 Maret 2017:

Menurut silsilah yang ada dari beberapa generasi, Pangeran Asir yang ada di OKU (Ogan Komering Ulu) berasal dari

daerah Surabaya yang merantau dan kemudian menetap di desa Lawang Agung. Pangeran Asir pada usia 19 tahun diangkat oleh Belanda menjadi mantri garam, di usia 21 tahun ia dipilih menjadi Pasirah Sindang Marga dan memimpin selama tiga fase pemerintahan yaitu zaman kolonial Belanda, zaman Jepang dan Kemerdekaan (B. Asir, 2017a).

Silsilah Pangeran H. Muhammad Asir
(Sang Penguasa Kawedanan Rupit Rawas)

Bagan 1. Silsilah Pangeran H. Muhammad Asir

Sumber: Data Kota Muara Rupit

Sosok Pangeran Asir adalah pribadi yang tanggap dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kawedanan Rupit Rawas seperti yang disampaikan oleh, M. Y. Asir (2017):

Ketika ada kekurangan pangan (beras) pangeran langsung turun kemasyarakat untuk menyelesaikannya dengan cara menghadap gubernur ke Palembang untuk meminta bantuan beras dan pangeran adalah pribadi yang tegas sewaktu pangeran memimpin perjudian dan minum-minuman keras hampir tidak ada di masyarakat Rupit Rawas.

Hal senada dipertegas oleh tokoh masyarakat Muara Rupit, bapak Az, Kamaludin (2017):

“Pangeran Asir pemimpin yang baik dan memikirkan rakyatnya, dalam memimpin Pangeran Asir membangun hubungan sosial yang baik dengan rakyat, tokoh masyarakat serta tokoh agama, tidak bertangan besi dan sosok yang adil “.

Pangeran Asir juga seorang administrator ulung, tertib dalam hal administrasi. Selama memimpin Kawedanan Rupit Rawas, pernah satu ketika saat Pangeran Asir sedang berada disawah datang seorang *contrelir* Belanda langsung meminta kunci brankas dan menyegel brankas tersebut, di dalam brankas tersebut terdapat laporan keuangan termasuk soal pendapatan dan pengeluaran Kawedanan Rupit Rawas, Pangeran Asir tidak khawatir karna beliau rapi dan tertib dalam hal administrasi.

Perkembangan masyarakat Indonesia yang terjadi dalam konteks situasi kolonial sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan tindak-tanduk dan sikap Kolonial Belanda. Elit modern lebih beranekaragam, tetapi di sini sedikit saja usaha yang dilakukan untuk menguraikann elit modern ini secara struktural. Elit politik terdiri dari orang-orang Indonesia terlibat di dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan, tetapi biasanya bertalian dengan sekadar perubahan politik (Van Niel & Rasuanto, 1984).

Pemerintah Kolonial Belanda dalam menguasai Kawedanan Rupit Rawas mempercayakan kepada Pangeran Asir untuk memimpin Kawedanan Rupit Rawas dengan catatan selalu membuat daftar pungutan dari rakyat. Informasi dari Bapak Ismail menyebutkan bahwa:

Kawedanan Rupit Rawas berada diwilayah kekuasaan Kolonial Belanda berpusat di Jambi. Pangeran Asir dipilih saat itu untuk memimpin daerah Rupit Rawas melakukan berbagai kebijakan, seperti diantaranya membuat sistem perdagangan antar wilayah dengan memanfaatkan aliran sungai Rawas menuju Palembang, memajukan perdagangan karet dan hasil bumi para pedagang dari daerah lain, menjadikan sungai Rupit sebagai pelabuhan antar daerah dengan mengenakan pajak saat singgah. Selain itu untuk menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Kolonial Belanda, Pangeran Asir juga membuat catatan pemasukan dan pengeluaran dengan stabil sehingga memperoleh kepercayaan dari Belanda.

Kepemimpinan memberikan sebuah nilai pada kehidupan kerja seseorang pada kehidupan kerja orang lain. Kepemimpinan adalah suatu proses dimana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai sebuah

tujuan. Sebuah pemerintahan yang hebat memiliki tujuan yang jelas, terdapat kerjasama, komunikasi yang baik serta memiliki komitmen yang kuat. Seorang Pangeran tidak akan dapat melakukannya sendiri. Ini adalah matra dari pemimpin teladan dan pernyataan ini sangat beralasan. Seorang Pangeran tidak dapat menyelesaikan hal-hal yang luar biasa hanya oleh dirinya sendiri. Kerja sama adalah keahlian tingkat tinggi yang memungkinkan Pangeran, golongan priyayi, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang dipimpinnya saling bekerjasama, rasa saling membutuhkan berfungsi secara efektif. Kerja sama dapat dipertahankan hanya ketika para pemimpin mempromosikan rasa saling bergantung perasaan bahwa kita menghadapi masalah secara bersama-sama (Rini, 2006).

Asir (2017) menuturkan bahwa:

Sebagai seorang ayah (pemimpin dalam keluarga), sosok Pangeran Asir adalah sangat peduli akan segala keperluan anaknya. Pangeran Asir mengatur segala apa yang diperlukan anaknya saat berada diperantauan untuk memperoleh pendidikan. Uang yang diberikan sesuai dengan jangka waktu keperluan selama sebulan. Namun untuk buku beliau sangat mendukung dan anak-anaknya harus memiliki buku yang menjadi kewajiban selama sekolah.

Seorang pemimpin atau pangeran dalam suatu daerah adalah orang yang paling bertanggung jawab atas daerah yang dipimpinnya. Pangeran adalah penghubung antara rakyat yang dipimpin dengan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Gagasan Boeke mengenai ekonomi Indonesia tidak terbatas pada menggalakkan koperasi pribumi. Boeke merasa bahwa pemerintah harus mengarahkan perhatian pada orang-orang yang bersemangat, memusatkan perhatian untuk membantu mereka dari pada terus menerus dengan karya besar yang tanpa hasil dengan mencoba meningkatkan kehidupan seluruh penduduk (Van Niel & Rasuanto, 1984).

Salah satu peran kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin adalah peran membangkitkan semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif. Penghargaan adalah bentuk pujian yang tidak berbentuk uang, sementara insentif adalah pujian yang berbentuk uang atau benda yang dapat dikuantifikasi. Peran membangkitkan semangat kerja dalam bentuk memberikan dukungan bisa dilakukan melalui kata-kata, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kalimat-kalimat yang sugestif. Sebagai orang yang berada di puncak dan dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding yang dipimpin, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan bimbingan yang tepat dan

simpatik kepada bawahannya yang mengalami masalah dalam melaksanakan pekerjaannya (Sashkin, Marshall & Sashkin, 2002).

Sebagai konsekuensi dari terbentuknya *Afdeeling* dan *Onder Afdeeling* adalah mendirikan kantor pemerintahan atau *gouvernement* serta membangun sarana dan prasarannya, seperti pusat pertokoan/perbelanjaan, pusat pelayanan kesehatan, kantor pos, kantor polisi, peradilan, rumah tahanan, dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tentunya dibedakan antara kota *Afdeeling* (setingkat Kabupaten) dengan kota *Onder Afdeeling* (setingkat Kawedanan) (Suwandi, 2010).

Kharismatik Pangeran Asir dalam kehidupan politik sangat baik. Dalam perjalanan karirnya memimpin rakyat Rupit Rawas ia selalu adil dan bijaksana. Pangeran Asir memerintah selama dua periode. Tidak ada kendala yang ditimbulkan oleh masyarakatnya. Rakyat dengan senang hati menerima kepemimpinan Pangeran Asir kembali setelah pemimpin sebelumnya melepaskan diri dari jabatannya. Alasan yang kuat ia karena Pangeran Asir mampu menjaga eksistensi wilayahnya, baik dimata masyarakat Rupit Rawas maupun di mata Kolonial Belanda karena kearifan yang dan kejujuran yang dimiliki serta teratur dalam urusan administratif sehingga disukai siapapun yang mengenal Pangeran Asir.

Menurut Baijuri Asir (wawancara 03 April 2017):

Saat bangsa Indonesia sedang berjuang lepas dari penjajahan Kolonial Belanda, Pangeran Asir memberikan fasilitas tempat tinggal bagi para pejuang dari Sumatera Selatan. Pangeran Asir menjadikan rumahnya sebagai basis perjuangan para pejuang demi NKRI di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Rupit Rawas. Sehingga saat diketahui pemerintah Kolonial Belanda bahwa rumah kediaman Pangeran Asir menjadi basis para pejuang NKRI, maka Belanda sering melakukan serangan disekitar wilayah Pangeran Asir. Di rumah Pangeran Asir sering terjadi baku tembak antara para pejuang NKRI melawan Belanda. Sampai sekarang bukti bekas tembakan peluru masih sangat terlihat jelas dari balik-balik rumah peninggalan Pangeran Asir.

Salah satu cara untuk dapat meramalkan sikap dan tindak-tanduk orang lain dalam keadaan tertentu ialah dengan mengetahui bagaimana pandangan orang itu terhadap dirinya sendiri. Pandangan seseorang terhadap diri sendiri biasanya merupakan suatu *synthese* dari pada aspirasi pendidikan, pengalaman dan penilaian orang-orang sekelilingnya kepadanya. Seseorang mengambil keputusan selaku individu untuk melindungi atau memperbesar

pandangan terhadap dirinya sendiri. Nilai berakar lebih dalam dan karenanya lebih stabil dibandingkan sikap individu. Dalam konteks yang relevan, pada gilirannya nilai cinta damai itu akan menjadi dasar pembentukan sikap manusia Indonesia sebagai individu terhadap suatu isu atau permasalahan, sehingga bangsa Indonesia sering cenderung menghindari konflik (Azwar, 2013).

Simpulan

Kawedanan Rupit Rawas merupakan sebuah wilayah jajahan Belanda dibawah Karesidenan Palembang. Tahun 1823 oleh Kolonial Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Palembang dan kemudian menghapuskan Kesultanan Palembang. Kolonial Belanda membagi wilayah-wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang menjadi beberapa *Afdeling*, kemudian *Onder Afdeling* sampai akhirnya Kawedanan dan wilayah-wilayah lainnya. Kolonial Belanda memerintah wilayah jajahannya untuk tingkat Karesidenan, *Afdeling* sampai *Onder Afdeling* dipimpin oleh warga berkebangsaan Belanda, namun untuk tingkat Kawedanan ke level bawah. Kolonial Belanda mempercayakan pemimpin lokal pilihannya untuk membantu mengatur roda kekuasaannya. Pemimpin lokal yang memimpin sebuah wilayah Kawedanan atau dibawahnya tentunya seorang pemimpin yang mendukung kekuasaan Belanda. Pemimpin lokal setingkat Kawedanan diberi gelar Pangeran, yang tugasnya mengatur Kawedanan dan mendukung kekuasaan Belanda.

Pangeran Asir merupakan sosok pemimpin kharismatik yang pemimpin Kawedanan Rupit Rawas. Pangeran Asir adalah seorang pemimpin pilihan Kolonial Belanda karena dianggap cakap, cerdas dan ulung dalam bertindak menjaga komitmen untuk Belanda. Kolonial Belanda menganugerahi gelar pangeran kepada Pangeran Asir sebagai penguasa Kawedanan Rupit Rawas. Rupit Rawas saat itu memiliki wilayah yang subur dan dialiri sungai Rawas yang menyebabkan munculnya perdagangan yang maju. Banyak sumber alam, seperti karet, buah-buahan dan lain-lainnya yang dihasilkan di Kawedanan Rupit Rawas ini. Rumah sekaligus tempat mengatur pemerintahan Pangeran Asir di Kawedanan Rupit Rawas, berada di pinggir sungai Rupit Rawas yang menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat Rupit Rawas dalam perdagangan. Pangeran Asir dengan mudah mengatur sistem pemerintahannya di lokasi yang sangat strategis di pinggir sungai Rawas.

Daftar Rujukan

Yadri Irwansyah, Agus Susilo
Pangeran Asir Sang Penguasa Kawedanan Rupit Rawas (Tinjauan Historis Kepemimpinan
Politik Pangeran Asir Tahun 1922-1942)

- Alian, S. (2012). *Metodologi Sejarah Dan Histiografi*. Palembang: Proyek SP4.
- Asir, B. (2017a). *Wawancara Mengenai asal asul Pangeran Asirtanggal 1 Maret 2017*.
- Asir, B. (2017b). *wawancara tentang Pangeran Asir 03 April 2017*.
- Asir, B. (2018). *wawancara tentang Kawedanan Rupit Rawas tanggal 13 Maret 2018*.
- Asir, M. Y. (2017). *Wawancara tentang Sosok Pangeran Asir tanggal 21 April 2017*.
- Az, K. (2017). *Wawancara Tentang Sosok Pangeran Asir tanggal 20 April 2017*.
- Az, K. (2018). *wawancara tentang Kitab Undang-Undang Simbur Cahayaditulis oleh Ratu Sinuhun, istri dari penguasa Palembang Pangeran Sido Ing Kenayang (1636-1642) 20 April 2018*.
- Azwar, S. (2013). *Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya (Vol. 18)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah. (N. Notosusanto, Trans.)*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Kuntowijoyo, D. R. (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Marzuki Yass. (2004). *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Palembang: Proyek: SP4 Universitas Sriwijaya.
- Nawiyanto & Endrayadi, Eko, C. (2016). *KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM: SEJARAH DAN WARISAN BUDAYANYA*. Jember: Jember University Press.m.
- Nottingham. (1996). *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Pasolong, H. (2008). *Kepemimpinan birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rini, W. A. (2006). *Kepemimpinan yang membangun tim. Moderenisasi, 2(2), 66–75*.
- Romdon. (1996). *Metodologi ilmu perbandingan agama: suatu pengantar awal*. Jakarta: Raya Grafindo Persada.
- Sashkin, Marshall & Sashkin, M. G. (2002). *Prinsip-Prinsip Kepemimpinan, terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suwandi. (2010). *Sejarah Museum Subkoss Garuda Sriwijaya di Lubuklinggau*. Lubuklinggau: Yayasan Subkoss Garuda Sriwijaya Perwakilan Lubuklinggau.

Thoha, M. (2010). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. cet. Ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Van Niel, R., & Rasuanto, B. (1984). *Munculnya elit modern Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.